280 Korban

Sambungan hal 1

sehingga jumlah total yang meninggal dunia menjadi 26 orang.

Dengan demikian masih ada 19 orang korban yang hilang dalam pencarian dari total sebanyak 325 orang korban bencana tanah longsor yang terdata secara resmi di Posko Utama Operasi SAR pada Jumat (12/7) atau operasi SAR hari keenam.

"Besok hari ketujuh atau hari terakhir operasi SAR. Tapi Basarnas siap untuk membuka dan melanjutkan kembali operasi SAR sampai korban dievakuasi selama masa tanggap darurat ini," kata Edy yang berada di Desa Tulabolo Timur.

(Ant/San)-f

Atur

Sambungan hal 1

paling lama 5 tahun sejak berlakunya UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara.

Kemudian pada Pasal 7, pelaku usaha pelopor dapat dikenakan tarif atas pengelolaan aset dalam penguasaan (ADP) oleh OIKN hingga Rp 0 atau dengan pembayaran secara angsuran. Insentif untuk pelaku usaha juga diberikan dalam bentuk jaminan kepastian jangka waktu hak atas tanah yang disebutkan dalam Pasal 9.

Pada Pasal 9 ayat 2, hak guna usaha diberikan hingga 190 tahun yang diberikan melalui dua siklus atau selama 95 tahun dalam satu siklus pertama dan 95 tahun pada siklus kedua.

"Hak guna usaha untuk jangka waktu paling lama 95 (sembilan puluh lima) tahun melalui 1 (satu) siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk 1 (satu) siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 (sembilan puluh lima) tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi," demikian bunyi Pasal 9 ayat 2 dalam Perpres tersebut.

Pemerintah juga memberikan jaminan hak guna bangunan dengan jangka waktu paling lama 80 tahun pada siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali pada siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun, sehingga totalnya 160 tahun untuk HGB.

Hak pakai bangunan juga diberikan dengan jangka waktu paling lama 80 tahun pada siklus pertama dan 80 tahun berikutnya pada siklus kedua. Ketiga hak atas tanah tersebut tentunya diberikan berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi.

Pemerintah mengatur mengenai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang akan ditetapkan oleh OIKN pada saat menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus. Pelaksanaan percepatan pembangunan IKN bertujuan untuk membentuk ekosistem kota layak huni, khususnya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan.

(Ant/San)-f

Perkara

Sambungan hal 1

Saat ini, sedang dilakukan proses klarifikasi tim APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) Inspektorat," kata Kepala Disdikbud Jateng Uswatun Hasanah di Semarang.

Piagam itu berasal dari kompetisi Malaysia Internasional Virtual Band Championship 2022 yang menyatakan bahwa Grup Gita Bahana Smepsa SMPN 1 Semarang memperoleh medali emas atau juara satu. Namun, berdasarkan penelusuran di laman resmi penyelenggara kompetisi tersebut, Grup Gita Bahana Smepsa hanya memeroleh medali perunggu sehingga piagam yang disertakan saat mendaftar pun akhirnya dianulir.

Inspektur Jateng Dhoni Widianto menjelaskan saat ini masih melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terduga yang bertujuan mencari fakta kejadian dan ditargetkan selesai sebelum habis masa daftar ulang. Selama proses klarifikasi, tim APIP terus mendalami berdasarkan informasi yang disampaikan yang kemudian dikembangkan untuk mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi dalam kasus tersebut. "Untuk itu, sedang kami dalami. Klarifikasi yang jelas ke pihak terduga. Kami masih fokus di pencarian fakta. Jadi, tugas kami hanya mencari fakta sebenarnya. Belum sampai ke sanksi," katanya.

(Ant/Has)-d

Retas

Sambungan hal 1

"Sehingga dengan dilakukan SEO ini diharapkan (oleh pelaku) tampilan website tersebut muncul di halaman pertama mesin pencari Google," kata Syahduddi.

Kemudian, ketika situs yang sudah diretas itu muncul pada halaman pertama Google, sehingga sering muncul pada pencarian Google pemain judi online. "Ketika itu sudah berhasil dilakukan, maka para pelaku ini tinggal menyewakan alamat situs tersebut kepada para (bandar) pemain judi online yang ada di negara Kamboja," kata Syahduddi.

Dari hasil penyewaan situs tersebut, sindikat bisa mendapatkan mulai Rp 3 juta sampai Rp 20 juta setiap harinya untuk satu situs. Dari hasil penyewaan tersebut, nilainya bervariasi, tergantung seberapa banyak situs tersebut dikunjungi ataupun dimainkan oleh para pemain judi online. "Kisarannya antara Rp 3 juta sampai Rp 20 juta perharinya persitus yang disewakan," kata Syahduddi.

Dalam kurun waktu tiga bulan terakhir, jumlah perputaran uang yang ditemukan pada beberapa rekening di Kamboja sebesar Rp 170.103.801.000.

Terhadap para pelaku, penyidik menjerat dengan Pasal 45 ayat 3 juncto Pasal 27 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 303 KUHP tentang perjudian, dengan ancaman hukuman pidana maksimal 10 tahun penjara.

Polisi telah menggerebek markas judi online di sebuah apartemen di Kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, serta meringkus tujuh orang terduga pelaku pada Kamis (4/7). "Total tujuh orang sudah berhasil kita amankan," kata Syahduddi.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Andri Kurniawan mengatakan, penggerebekan itu berawal dari adanya laporan masyarakat mengenai dugaan judi online di salah satu unit apartemen di lokasi kejadian. "Dari hasil penyelidikan, benar didapatkan adanya kegiatan usaha perjudian online yang dioperasikan oleh enam orang pelaku dengan inisial FAF (26), AE (39), YGP (20), FH (21), GF (21) dan FAP (19)," ujarnya.

Pihak Kepolisian pun melakukan pengembangan dan mengamankan satu orang lainnya, yakni pria berinisial MHP (41) yang merupakan pemilik rekening penampung uang hasil kejahatan.

Kepolisian telah menangkap 29 pelaku judi online di Jakarta Barat selama periode 8-11 Juni 2024. Kapolres Metro Jakarta Barat menyebutkan, dari 29 pelaku judi tersebut, sebagian pemain judi daring dan sebagian lainnya berperan memasarkan judi tersebut. "17 orang selaku pemain judi online dan 12 orang selaku telemarketing," kata Syahduddi.

(Ant/San)-f

Satgas

Sambungan hal 1

Menurut data penelitian yang dilakukan oleh Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media) bekerja sama dengan International Media Support (IMS) 82.6 persen jurnalis perempuan pernah mengalami kekerasan seksual selama mereka berkarier dalam bidang jurnalistik. Data penelitian yang dilakukan pada tahun 2022 lalu terhadap 852 jurnalis perempuan di 34 provinsi tersebut menjadi salah satu dasar pentingnya perlindungan terhadap semua kalangan tidak terkecuali jurnalis perempuan.

Berbagai bentuk kekerasan seksual yang menimpa jurnalis bisa terjadi melalui daring maupun luring. Beragam bentuk kekerasan seksual yang dialami jurnalis perempuan di Indonesia tersebut di antaranya body shaming secara luring (58,9 persen), catcalling secara luring (51,4 persen), body shaming secara daring (48,6 persen), menerima pesan teks maupun audio visual yang bersifat seksual dan eksplisit secara daring (37,2 persen), dipaksa melakukan hubungan seksual secara luring (2,6 persen).

Sementara itu riset UNESCO, 73% dari 900 orang jurnalis perempuan di 125 negara yang disurvey pernah mengalami kekerasan melalui ranah digital selama karir jurnalistik mereka.

Melihat tingginya angka kekerasan seksual yang dialami jurnalis tersebut mendapatkan perhatian Dewan Pers. Jalan panjang dalam upaya perlindungan terhadap jurnalis tersebut akhirnya mendapat angin segar, pada akhir Juni lalu Dewan pers sebagai lembaga independent yang melindungi insan pers akhirnya mengesahkan pedoman PPKS (pedoman pencegahan kekerasan seksual) di lingkungan pers. Secara garis besar pedoman tersebut berisi tentang bagaimana pencegahan, penanganan dan bagaimana pemulihan terhadap korban. Tujuannya jelas, dengan adanya pedoman ini dapat meminimalisir kekerasan seksual yang dapat menimpa siapa saja termasuk jurnalis serta membantu pemulihan korban kekerasan seksual.

Keberadaan pedoman PPKS ini tentunya butuh pengawasan dari berbagai pihak tidak hanya organisasi pers namun yang lebih utama adalah perusahaan pers yang harus membuat satgas PPKS.

Pascapedoman PPKS di lingkungan pers diterbitkan, Dewan Pers mendorong perusahaan pers segera membentuk satgas PPKS di media pers.

Upaya preventif ini dilakukan agar insan pers yang selama ini kerap menyuarakan anti kekerasan seksual juga mendapatkan perlindungan di tempat mereka bekerja. Keberadaan satgas PPKS di perusahaan pers masih sebatas anjuran, namun ke depan ada wacana bahwa keberadaan satgas PPKS ini menjadi syarat wajib verifikasi media pers.

Keberadaan satgas PPKS di media pers ini hanya satu dari sekian upaya untuk menekan angka kekerasan seksual pada jurnalis khususnya jurnalis perempuan.

Apakah upaya ini akan efektif? Tentu perlu sinergi dari berbagai pihak. Proses kerja jurnalis memang dilindungi oleh undang undang pers. Namun itu saja tidak cukup, butuh kerjasama dari masyarat umum, organisasi media, asosiasi jurnalis, media pers dan pemerintah untuk membangun iklim yang aman bagi jurnalis.

(Penulis, Dosen Ilmu Komunikasi Binus University)-f

INAGURASI KOMPETISI ICT AMICTA 2024

Tingkatkan Budaya Kompetisi Bidang IT

KR-Istimewa

Para pemenang AMICTA 2024 saat menerima penghargaan.

YOGYA (KR) - Universitas Amikom Yogyakarta mengadakan Inagurasi Kompetisi ICT AMICTA 2024 di Ruang Cinema Amikom, Jumat (12/7), sebagai puncak rangkaian kegiatan AMICTA 2024 yang berlangsung sejak diluncurkan 7 Juni 2024 hingga puncak acara 12 Juli.

AMICTA merupakan kompetisi untuk meningkatkan budaya kompetisi berprestasi bagi masyarakat Indonesia, khususnya sivitas akademika Universitas Amikom Yogyakarta pada Fakultas Ilmu Komputer (FIK). Tahun ini, AMICTA 2024 mengusung tema 'Messenger of Innovation Change' dengan simbol Hanoman. "Kompetisi ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan pengalaman peserta di bidang IT serta menjadi batu loncatan menuju kompetisi nasional dan internasional," kata Ketua AMICTA Banu Santoso MM.

Kompetisi ICT tersebut dibagi dalam 11 kategori, terdiri 8 Kategori Product Based, yaitu: Videografi dan VFX, Animasi 2D & 3D, Media Pembelajaran (AR/VR), Aplikasi Sistem Informasi, UI/UX Design, Bisnis Digital, Pengembangan Game, AI dan IOT. Serta 3 Kategori Skill Based meliputi Pemrograman, Keamanan Siber, dan Jaringan.

Banu Santoso mengatakan, AMICTA 2024 ada 377 pendaftar terdiri 327 tim untuk Product Based dan 50 tim untuk kategori Skill Based. Untuk kategori Product Based, diseleksi lebih lanjut hingga menyisakan 50 tim yang bisa mengikuti Pameran Karya AMICTA.

AMICTA 2024 kategori Media Pembelajaran dan AR/VR Juara 1 Muhammad Akbar, Fikan Wahyu, Ari Surya dan M Caesar. Juara 2 VR Museum Arkheofosi Indra Febryan Noor, Desy Ikasari, dan Syahnaz Tasya. Sedangkan Juara 3 S-Quiz VR Basrian, Farel Ahmed Andrian, dan Tsua'un Ibnu Alif Fatthakurrozak.

(Ria)-d

12 Calon

Sambungan hal 1

Hakim M. Taufik HZ pada kesempatan yang sama. "Keputusan Komisi Yudisial bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat," tandasnya.

Daftar calon hakim agung untuk Kamar Pidana yakni Abdul Azis (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan), Annas Mustaqim (Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI) dan Aviantara (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado). Untuk Kamar Perdata yakni Ennid Hasanuddin (Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung RI), Kamar Agama adalah Muhayah (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda), Kamar Tata Usaha Negara yakni Mustamar (Inspektur Wilayah III Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI).

Kemudian Kamar Tata Usaha Negara (Khusus Pajak) adalah Diana Malemita Ginting (Auditor Utama pada Inspektorat II Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan), Hari Sih Advianto (Hakim Pengadilan Pajak), dan Tri Hidayat Wahyudi (Hakim Pengadilan Pajak).

Sementara untuk calon hakim ad hoc HAM di MA adalah Agus Budianto (Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan), Bonifasius Nadya Arybowo (Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung), dan Mochammad Agus Salim (Dosen S-2 Fakultas Hukum Universitas Trisakti).

(Ant/Has)-f

Satu

Sambungan hal 1

"Kami sudah menyerahkan beberapa barang bukti berupa bukti percakapan aplikasi media sosial antara Rico dan HB. Kami juga telah memberikan bukti percakapan HB kepada pemred media tempat Rico bekerja terkait permintaan menurunkan berita," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan jajarannya akan menindaklanjuti laporan terkait keterlibatan oknum TNI AD dalam kasus pembunuhan wartawan Rico Sempurna Pasaribu di Medan, Sumatera Utara. "Bahwa TNI AD , dalam hal ini Puspomad, akan menindaklanjuti laporan tersebut dan berkoordinasi dengan Pomdam I/BB, karena locus delictie kejadian ada di wilayah Kodam I/BB," katanya saat dikonfirmasi di Jakarta.

Kristomei mengapresiasi upaya keluarga korban yang mau melapor ke Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Puspomad) terkait dugaan keterlibatan oknum TNI AD. Hal tersebut dinilai sangat membantu TNI AD dalam menindak tegas oknumnya yang melakukan tindakan kriminal. "Jika nanti terbukti ada oknum yang terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut, kami memastikan akan menindak prajurit sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun kita tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan," katanya.

(Ant/Has)-d

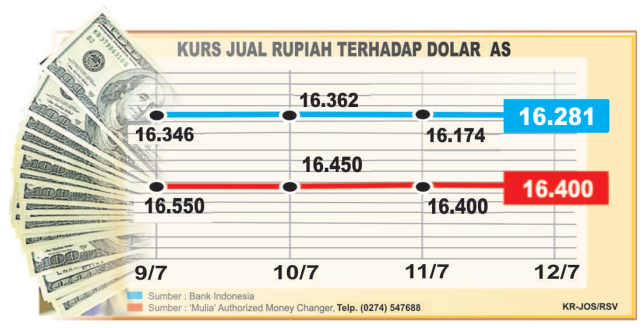

Prakiraan Cuaca — Sabtu, 13 Juli 2024

Lokasi	Cuaca: Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu °C	Kelembaban
Bantul					22-30	65-95
Sleman					22-29	65-95
Wates					22-29	65-95
Wonosari					22-30	65-95
Yogyakarta					22-30	65-95

Cerah, Berawan, Udara Kabur, Hujan Lokal, Hujan Petir

Grafis : Arko

9 Juta Lebih Gen Z di Indonesia yang Menganggur, Apa Masalahnya?

Fahrul Imam Santoso, SE MAk Ak CA CFR
Dosen dan Sekprodi Akuntansi Universitas Amikom Yogyakarta

INDONESIA menghadapi masalah yang signifikan terkait tingginya angka pengangguran di kalangan Gen Z. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 9,9 juta orang di antara usia 15-24 tahun di Indonesia menganggur pada tahun 2023. Angka ini mewakili sekitar 22% dari total populasi usia 15-24 tahun di Indonesia, yang mencapai 44,47 juta orang. Masalah ini tidak hanya mempengaruhi ekonomi nasional, tetapi juga memungkinkan terjadinya krisis demografi yang potensial.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya angka pengangguran adalah perbedaan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kebutuhan pasar kerja. Lulusan dari sekolah menengah atas dan universitas sering kali tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri, yang menyebabkan kesulitan mereka dalam mendapatkan pekerjaan. Selain itu, terdapat kekurangan pekerjaan yang cukup untuk memenuhi permintaan dari para pencari kerja. Hal ini disebabkan oleh stagnasi industri, terutama di sektor manufaktur, yang menghasilkan lebih sedikit pekerjaan.

Saat ini lebih dari 84% dari populasi Indonesia bekerja di sektor informal, yang tidak memberikan perlindungan sosial dan tidak menghasilkan pajak. Hal ini mengurangi pendapatan negara dan memungkinkan terjadinya krisis sosial di masa depan. Pendidikan dan pelatihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja juga menjadi masalah. Pemerintah perlu memperkuat pendidikan vokasional dan pelatihan yang berorientasi pada industri untuk mengurangi kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kebutuhan pasar kerja.

Bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan ini? Tentunya pemerintah saat ini perlu mulai memikirkan bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan ini. Karena jika tidak dan terus dibiarkan maka akan menjadi 'Bom Waktu' yang akan berdampak pada masalah nasional yang berdampak pada ekonomi nasional negara. Pemerintah harus meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan yang diberikan, terutama di bidang vokasional. Pendidikan harus lebih fokus pada keterampilan yang dibutuhkan oleh industri, dan pelatihan harus lebih berorientasi pada kebutuhan pasar kerja.

Selanjutnya, Pemerintah harus bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Pendidikan, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), untuk mengembangkan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Pemerintah harus berusaha meningkatkan jumlah pekerjaan yang tersedia di sektor formal, yang dapat memberikan perlindungan sosial dan menghasilkan pajak. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan investasi di sektor-sektor yang potensial, seperti teknologi dan layanan. Pemerintah juga perlu memperkuat pemberdayaan ekonomi di sektor informal dengan memberikan akses ke pendidikan dan pelatihan yang lebih baik, serta memberikan dukungan keuangan untuk memulai usaha sendiri. Hal ini dapat membantu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan.

Pengembangan Teknologi juga menjadi hal penting yang perlu ditingkatkan untuk saat ini. Sektor teknologi saat ini cukup diuntungkan untuk menyerap tenaga kerja, terutama di kalangan Gen Z yang lebih suka bekerja secara remote. Pemerintah harus memperkuat investasi dalam teknologi dan memfasilitasi pengembangan startup dan perusahaan yang berorientasi pada teknologi. Angka pengangguran yang tinggi di kalangan Gen Z di Indonesia merupakan tantangan serius yang harus dihadapi. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan, melakukan pengembangan sektor formal, mendorong pemberdayaan ekonomi di sektor informal, serta memperkuat pengembangan teknologi. Dari solusi tersebut, Indonesia dapat memanfaatkan demografi yang berpotensi untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan mencapai visi "Indonesia Emas 2045". Semoga!

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Creative Economy Park